

EVALUASI KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KONDISI EKSISTING WP KOTABARU DARAT DAN ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH KOTABARU BERDASARKAN KEBIJAKAN SPASIAL

Khairul Azmir¹, Nadia Afsari²

khairulazmir30@gmail.com¹, nadiaafsari07@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

ABSTRAK

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen kebijakan spasial yang mengatur arah Pembangunan suatu wilayah selama dua puluh tahun. Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi rencana tata ruang wilayah pada kondisi eksisting suatu wilayah. Metode penelitian Kebijakan (Policy Research) digunakan pada penelitian ini untuk melihat kesesuaian dokumen dan lapangan dan arahan pengembangan wilayahnya.

Kata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Evaluasi, Pengembangan Wilayah.

ABSTRACT

The Regional Spatial Planning Plan is a spatial policy document that regulates the direction of development of a region for twenty years. Evaluation of the suitability of regional spatial planning plans is important to determine the extent to which regional spatial planning plans are realized in the existing conditions of a region. Policy research methods are used in this research to see the suitability of documents and the field and directions for regional development.

Keywords: *Regional Spatial Planning, Evaluation, Regional Development*

PENDAHULUAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu kebijakan spasial atau kebijakan tata ruang yang mengatur pengembangan dan arahan suatu wilayah dalam dua puluh tahun mendatang dengan melihat berbagai potensi dan permasalahan suatu wilayah. Dalam waktu dua puluh tahun rencana tata ruang suatu wilayah dilakukan revisi setiap lima tahun untuk melihat apakah rencana yang telah dibuat masih sesuai dan efektif dilanjutkan selama beberapa tahun kedepan.

Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah dilakukan untuk melihat sejauh mana realisasi rencana tersebut pada kondisi eksisting, selayaknya kebijakan ini harus sesuai dengan kondisi eksisting agar tujuan dan arahan pembangunan wilayah dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam beberapa tahun terakhir banyak perubahan dalam hal Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kotabaru khususnya pada Wilayah Perencanaan Kotabaru Darat yang berbatasan langsung dengan Provinsi lokasi Ibukota Negara di Kalimantan Timur. Evaluasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah pada Wilayah Perencanaan Kotabaru darat dilakukan untuk melihat sejauh mana rencana itu terealisasikan dan bagaimana arahan Pembangunan untuk wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kebijakan (Policy Research) dengan melihat arahan dari kebijakan yang dalam hal ini mengacu pada PERDA Kotabaru Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru tahun 2012-2032 lalu disandingkan dengan kondisi eksisting pada wilayah perencanaan Kotabaru Darat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdapat rencana berdasarkan variabel dan lokasi dimana rencana itu akan direalisasikan, Adapun setelah dilakukan pemilihan rencana yang berlokasi dalam lingkup WP Kotabaru Darat dan validasi akan kesesuaian rencana tersebut pada kondisi eksisting didapatkan hasil seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Rekap Kesesuaian Rencana WP Kotabaru Darat

KECAMATAN	RENCANA	HASIL	KETERANGAN	KONDISI
Hampang	Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus		ADA	Terjaga
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan pertanian lahan basah		ADA	Baik
	kawasan budidaya air tawar		ADA	Proses uji coba
	kawasan peruntukan wisata budaya		ADA	Baik
	Kawasan Lindung Meratus		ADA	Terjaga
Kelompok barat	Jalan nasional (kolektor primer)		ADA	Baik
	Jaringan jalan provinsi		ADA	Baik
	Jalan local primer		ADA	kurang baik
	Rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan		TIDAK ADA	
	Jaringan perkeretaapian angkutan penumpang dan barang antar kota PKW dan PKL		TIDAK ADA	
	Jaringan perkeretaapian angkutan penumpang dan barang antar kota PKW dan PKL		TIDAK ADA	
	Air Strip dan helipad		ADA	Baik
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		ADA	tidak berfungsi
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan budidaya air tawar		ADA	Baik
	Industri besar		ADA	Baik
	Kawasan Strategis Provinsi berupa Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)		ADA	Belum ada progress
	Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan		TIDAK ADA	
Kelompok Hilir	Rencanan pengembangan jalan dan jembatan pulau laut		TIDAK ADA	
	Rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan		TIDAK ADA	

KECAMATAN	RENCANA	HASIL	KETERANGAN	KONDISI
	Terminal penumpang tipe C		ADA	Baik
	Lintas penyeberangan antar pulau		ADA	Baik (fasilitas penunjang kurang)
	Jaringan perkeretaapian angkutan penumpang dan barang antar kota PKW dan PKL		TIDAK ADA	
	Rencana pelabuhan pengumpan lokal		ADA	Baik (swasta)
	Terminal khusus batubara		TIDAK ADA	
	Rencana terminal khusus industri semen		ADA	Baik
	Air Strip dan helipad		TIDAK ADA	
	Rencana Pembangunan bandar udara berskala internasional di Langadai		TIDAK ADA	
	rencana transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Kabel Laut Pulau Kalimantan (Batulicin - Serongga – Tarjun)		ADA	Baik
	Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), dan gas bumi		TIDAK ADA	
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		TIDAK ADA	
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan pertanian lahan basah		ADA	Baik
	kawasan budidaya air tawar		ADA	Baik
	Kawasan peruntukan wisata alam		ADA	Baik
	Kawasan Pengembangan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga)		TIDAK ADA	
Kelompok Selatan	Air Strip dan helipad		TIDAK ADA	
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		TIDAK ADA	
	kawasan pertanian lahan basah		ADA	Baik
Kelompok Hulu	Jalan nasional (kolektor primer)		ADA	Baik
	Rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan		TIDAK ADA	Belum ada progress
	Rencana terminal tipe C		ADA	Kurang Baik dan Tidak Beroperasi
	Jaringan perkeretaapian angkutan penumpang dan barang antar kota PKW dan PKL		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Air Strip dan helipad		ADA	Baik
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung		ADA	Baik dan Terjaga
	Kawasan cagar budaya		ADA	Baik dan

KECAMATAN	RENCANA	HASIL	KETERANGAN	KONDISI
				masih terlaksana
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan pertanian lahan basah		TIDAK ADA	Tidak Ada
	kawasan budidaya air tawar		ADA	Uji Coba
	Kawasan peruntukan wisata alam		TIDAK ADA	Tidak Ada
	kawasan peruntukan wisata budaya		ADA	Baik
	Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Cagar Budaya Makam		ADA	Baik
	Kawasan Cagar Budaya		ADA	Baik
Kelompok Tengah	Jaringan jalan provinsi		ADA	Baik
	Jalan local primer		ADA	Kurang Baik
	Air Strip dan helipad		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel		ADA	Baik
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan pertanian lahan basah		ADA	Baik
	kawasan budidaya air tawar		TIDAK ADA	Tidak Ada
	industri menengah		ADA	Baik
	Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan		TIDAK ADA	Tidak Ada
Kelompok Utara	Jalan local primer		ADA	Kurang Baik
	Air Strip dan helipad		ADA	Baik
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan pertanian lahan basah		ADA	Baik
	kawasan budidaya air tawar		ADA	Baik
	Kawasan Pengembangan Pesisir		TIDAK ADA	Tidak Ada
Pamukan Barat	Rencana pengembangan jaringan jalan (pamukan utara – HSU)		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Rencana pengembangan jaringan jalan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur		ADA	Baik
	Rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Terminal penumpang tipe C		ADA	Kurang Baik
	Jaringan perkeretaapian angkutan penumpang dan barang antar kota PKW dan PKL		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), dan gas bumi		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus		ADA	Baik

KECAMATAN	RENCANA	HASIL	KETERANGAN	KONDISI
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan budidaya air tawar		ADA	Baik
	Kawasan peruntukan wisata alam		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Strategis Provinsi berupa Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)		ADA	Masih Rencana
	Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Lindung Meratus		ADA	Baik
Pamukan Selatan	Jalan local primer		ADA	Kurang Baik
	Rencana pelabuhan pengumpan lokal Sungai Durian		ADA	Baik
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel		ADA	Baik
	kawasan peruntukan hutan produksi		TIDAK ADA	Tidak Ada
	kawasan pertanian lahan basah		ADA	Baik
	kawasan peruntukan budidaya laut dan Sea Farming		ADA	Baik
	kawasan konservasi perairan		ADA	Baik
	Kawasan Pengembangan Pesisir		Tidak Ada	Tidak Ada
Pamukan Utara	Jalan local primer		ADA	Kurang Baik
	Rencana pengembangan jaringan jalan (pamukan utara – HSU)		TIDAK ADA	Tidak Ada
	WS Cengal – Batulicin		TIDAK ADA	Tidak Ada
	kawasan pertanian lahan basah		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Agro Industri Pertanian		ADA	Baik
	Kawasan Cagar Budaya Ratu Intan		ADA	Kurang Baik
Sampanahan	Jaringan jalan provinsi		TIDAK ADA	Baik
	Jalan local primer		ADA	Kurang Baik
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel		ADA	Baik
	rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung		ADA	Baik
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	kawasan pertanian lahan basah		ADA	Baik
	industri menengah		TIDAK ADA	Tidak Ada
Sungai Durian	Jalan local primer		ADA	Kurang Baik
	Rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Rencana terminal tipe C		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Rencana pelabuhan pengumpan lokal Sungai Durian		ADA	Baik
	Kilang minyak dan gas bumi		ADA	Baik

KECAMATAN	RENCANA	HASIL	KETERANGAN	KONDISI
	Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus		ADA	Baik
	kawasan peruntukan hutan produksi		ADA	Baik
	industri menengah		ADA	Baik
	kawasan peruntukan wisata budaya		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Strategis Provinsi berupa Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Agro Industri Pertanian Bungukuran		TIDAK ADA	Tidak Ada
	Kawasan Lindung Meratus		TIDAK ADA	Tidak Ada

(Hasil Observasi Lapangan, 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil evaluasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru pada WP Kotabaru Darat, pada hal keterangan terbagi menjadi dua warna yaitu biru sebagai tanda realisasi sudah ada dan merah untuk pertanda realisasi tidak ada. Adapun secara singkat dapat dilihat pada gambar Pie Chart berikut.



Gambar 3. 1 Pie Chart Presentase Kesesuaian Rencana dan Eksisting

Dari keseluruhan rencana yang ada pada WP Kotabaru Darat hanya 38% yang belum terealisasi dan 62% dari rencana yang ada sudah terealisasi pada WP Kotabaru Darat.

Dan jika di tinjau dari kebijakan yang ada arahan Pembangunan pada Wilayah Kotabaru diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan sudut pandang ekonomi seperti pusat industri pengolahan, pusat industri pertanian dan perkebunan, pusat industri hasil perikanan, dan pusat pengembangan ekowisata yang mana hal ini berkesesuaian dengan kondisi eksisting wilayah Kabupaten Kotabaru.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Kabupaten Kotabaru khususnya pada Wilayah Perencanaan Kotabaru Darat memiliki presentase 62% untuk kesesuaian rencana tata ruang wilayah yang ada dan presentase 38% untuk rencana yang belum terealisasi. Presentase ini hendaknya menjadi evaluasi Bersama khususnya bagi pemerintah untuk menjalankan rencana Pembangunan melanjutkan rencana yang ada.

Dari kebijakan spasial yang ada didapatkan arahan untuk perkembangan wilayah Kabupaten Kotabaru sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan sudut pandang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru tahun 2012-2032.

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan tahun 2012-2032

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang